

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kecamatan Kaliwates merupakan salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Pembentukan wilayah kecamatan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah - wilayah Kabupate DATI II. Sesuai ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa batas wilayah Kecamatan Kliwates sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sukorambi
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Ajung
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Summersari
- d. Sebelah barat : Kecamtan Ramban

Berdasarkan data statistic, luas wilayah Kecamatan Kaliwates adalah kurang lebih 215 HA, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Mangli, Kelurahan Sempusari, Kelurahan Kaliwates, Kelurahan Tegal Besar, Kelurahan Jember Kidul, Kelurahan Kepatihan, Kelurahan Kebon Agung.

Kecamatan kaliwates merupakan sebuah kecamatan yang memiliki daerah ketinggian yang bisa dikatakan cukup tinggi yakni sekitar 98 m dan berbeda dengan daerah/kecamatan lainnya. Hal itu mempengaruhi tingkat kesuburan tanah yang bisa dikatakan tanah di daerah kecamatan kaliwates memiliki presentase tanah kering (tidak subur) dan tanah subur sekitar 30:70 terhadap luas keseluruhan. Dengan kondisi demikian masyarakat kecamatan Kaliwates lebih memilih menjadi karyawan baik itu karyawan swasta maupun Negri, buruh sebagai pekerjaannya.

Wilayah penelitian merupakan gal yang diperlukan untk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut.

4.1.1 Keadaan Penduduk Kecamatan Kaliwates

Berdasarkan registrasi tahun 2014 jumlah penduduk Kecamatan Kaliwates sebanyak 114.525 jiwa, dengan jumlah penduduk laki - laki 55.582 jiwa, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk wanita yaitu 58.943 jiwa. Daftar data pertumbuhan penduduk wilayah Kecamatan Kaliwates tahun 2014 :

Tabel 4.1 :

Banyaknya Penduduk Menurut Kelurahan, Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2014

Sumber Kecamatan Kaliwates Dalam Angka 2015	Kelurahan	Laki	Perempuan	Jumlah
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa	Mangli	7.831	8.391	16.222
	Sempusari	4980	5315	10.295
	Kaliwates	6.664	6946	13.610
	Tegal Besar	15338	15665	31.003
	Jember Kidul	9.708	10.665	20.373
	Kepatihan	7.867	8.706	16.573
	Kebon Agung	3.194	3.225	6.449
	Tahun 2014	55.582	58.943	114.525
	Tahun 2015	54.594	54.944	113.276

tingkat kepadatan penduduk di wilayah kecamatan kaliwates dapat terbilang padat yang dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mencapai 114.525 jiwa pada tahun 2014 dan kemudian mengalami kemerosotan jumlah penduduk menjadi 113.276 jiwa di tahun 2015.

Dari tabel diatas dapat kita kelompokkan sesuai umur, jenis kelamin dan rasio jumlah kelamin dari keseluruhan banyaknya penduduk yang menempati kecamatan kaliwates pada tabel di bawah ini

Tabel 4.2

Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Rasio Jenis Kelamin
---------------	---------------	---------------------

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
0-4	4.847	4.590	9.437	105,6
5-9	5.071	4.801	9.872	105,62
10-14	4.695	4.641	9.336	101,16
15-19	4.463	4.965	9.428	89,89
20-24	4.270	4.772	9.042	89,48
25-29	4.645	5.014	9.659	92,64
30-34	4.607	4.639	9.246	99,37
35-39	4.405	4.669	9.074	94,35
40-44	4.161	4.394	8.555	94,7
45-49	3.470	3.714	7.184	93,43
50-54	3.062	3.132	6.194	97,77
55-59	2.296	2.435	4.731	94,29
60-64	1.681	1.909	3.590	88,06
65-69	1.198	1.483	2.681	80,78
70-74	826	1.117	1.943	73,95
75+	694	1.198	1.892	57,93
Jumlah	54.391	57.470	111.861	94,64

Sumber Kecamatan Kaliwates Dalam Angka 2015

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk usia sekolah sangatlah banyak yang dapat diindikasikan bahwa usia 10-14 tahun mencapai 101,16%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Kaliwates harus memang benar-benar diperhatikan mengingat masyarakat usia sekolah dikecamatan kaliwates yang sangat besar.

4.1.2 Banyaknya Gedung Sekolah di Kecamatan Kaliwates

Gedung sekolah merupakan sarana penting bagi masyarakat dimana gedung sekolah merupakan sarana pendidikan yang digunakan masyarakat untuk menuntut ilmu, dikecamatan kaliwates ini sendiri yang tingkat usia pendidikan masyarakatnya yg dibidang besar sangatlah berpengaruh terhadap banyaknya gedung-gedung sekolah yang terdapat di kecamatan kaliwates dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.3

Banyak Gedung Sekolah Menurut Kelurahan dan Pengelola, tahun 2014

Kelurahan	Dispendik	Non Dispendik	Jumlah
Mangli	6	2	8
Sempusari	4	1	5
Kaliwates	5	2	7
Tegal Besar	7	3	10
Jember Kidul	5	3	8
Kepatihan	19	2	21
Kebon Agung	3	1	4
Tahun 2013	49	14	63
Tahun 2014	49	14	63

4.1.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Kaliwates

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam memajukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian dan kondisi sosial masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, dan untuk meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan kecamatan Kaliwates dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.4

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Kaliwates

Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
Tidak Tamat SD	16.223

Tamat SD	10.301
Tamat SMP	31.008
tamat SMA	41.623
Jumlah	99.155

Sumber : Kecamatan Kaliwates Dalam Angka

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam pendidikan masih bisa dikatakan tinggi dimana dapat diindikasikan bahwa lulusan Sekolah Menengah Atas masih diatas rata-rata yakni mencapai 41.623, berbeda dengan masyarakat yang tidak tamat Sekolah Dasar yang mencapai angka 16.223.

Dari tabel diatas itu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Kaliwates telah mampu menyelesaikan sampai tingkatan SMA dimana masyarakat diwajibkan untuk mengikuti wajib belajar 9 tahun, hal ini sangatlah berpengaruh bagi tingkat perekonomian masyarakat kecamatan Kaliwates dimana diharapkan masyarakat kecamatan kaliwates untuk bekerja dan membuka lapangan pekerjaan yang berdampak untuk mengurangi tingkat pengangguran di kecamatan kaliwates ini sendiri.

4.1.4 Keadaan Sosial Kecamatan Kaliwates

Dengan adanya perubahan politik dan sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, sangat memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Kaliwates untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis, hal ini dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat kecamatan kaliwates dalam pemilihan Bupati tahun 2016 memiliki tingkat partisipasi hampir 75% dari usia yang ditetapkan sebagai usia pemilih tetap dan memberikan hak pilihnya. Ini merupakan sebuah progres demokrasi yang cukup signifikan di kecamatan Kaliwates mengingat masyarakat Kecamatan Kaliwates yang dapat dikatakan salah satu Kecamatan yang berada di pusat Kabupaten Jember dimana masyarakatnya berfokus pada sebuah perekonomian namun masih sadar dengan pentingnya kehidupan berpolitik.

Berkaitan dengan letaknya yang berada di pusat kota suasana budaya masyarakat di kecamatan Kaliwates bisa dikatakan masih terasa dan dinamis, hal ini nampak jelas dalam hal kegiatan keagamaan yang mayoritas masyarakat Kecamatan Kaliwates ini adalah muslim, yang tergambar dari masih adanya budaya selamatan, tahlilan, pengajian mingguan, arisan dan lain-lainnya, yang dalam hal ini semuanya masih merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi yang semakin maju, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai bahwa babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Kecamatan Kaliwates. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama dan budaya di Kecamatan Kaliwates. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik namun secara sosiologis akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini masih belum pernah terjadi bencana alam maupun bencana sosial yang cukup berarti di Kecamatan Kaliwates. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan, pendidikan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

4.1.5 Kondisi Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kaliwates

Masalah pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara dan salah satu hal penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepannya. Masyarakat yang produktif harus didukung dengan kondisi kesehatan yang prima. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang terserang penyakit relatif rendah. Adapun penyakit yang sering diderita masyarakat Kecamatan Kaliwates yakni infeksi saluran pernafasan, demam berdarah dan diare. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi yang cukup lama dalam proses penyembuhannya, hal ini dikarekan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktivitas masyarakat Kecamatan Kaliwates pada umumnya.

Hal yang perlu dipaparkan juga yakni cara hidup sehat atau menjaga kesehatan terutama pada balita. Mengingat jumlah balita yang cukup besar yakni mencapai angka 10.375 jiwa masyarakat Kecamatan Kaliwates harus sadar akan partisipasinya dalam menjaga serta mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan balita. Melakukan imunisasi dan posyandu, merupakan sebuah tolak ukur masyarakat dalam berpartisipasi pemberantasan penyakit polio, campak dan lain-lain terhadap balita. Hal ini harus dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan Badan Kesehatan lainnya di Kecamatan Kaliwates.

4.2 Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan maka sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih. Adapun hasil penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut.

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau lebih yang kemudian dalam akan menimbulkan suatu pokok pikiran guna terselesainya sebuah tujuan yang hendak dicapai sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam hal ini komunikasi sangat penting dilakukan oleh lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga yang terkait guna tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam hal pengimplementasian sebuah kebijakan kartu indonesia pintar diwilayah kecamatan kaliwates setiap komunikasi yang dilakukan diharapkan untuk tidak terdapat sebuah *mis communication* atau komunikasi yang terhambat, menurut informan Kepala Upt. Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates Bpk. Siswotanoyo menyatakan bahwa.

“Proses komunikasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan kebijakan KIP dinilai cukup baik, hal ini tergambar dari hubungan antara pusat dan daerah tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah memberikan suatu arahan kepada UPT dinas pendidikan yang terdapat dikabupaten Jember mengenai, proses maupun syarat mendapatkan KIP itu sendiri yang kemudian dari pihak UPT dinas pendidikan memberikan sebuah informasi kepada seluruh masyarakat tentunya siswa dari sekolah-sekolah yang terdapat dalam wilayah kecamatan tentunya Kecamatan Kaliwates.”(Wawancara dengan Bpk.Siswotanoyo, 23 Mei 2016).

Selain itu menurut Bidang Pendidikan Pementrian Agama Kabupaten Jember Bpk. Nasri menyatakan bahwa.

“KIP merupakan sebuah kebijakan baru yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh presiden, jadi kebijakan ini tidak main-main menyangkut Pendidikan. Pada dasarnya kami sendiri membawahi seluruh madrasah yang terdapat di kabupaten, mengenai informasi KIP ini sudah kami informasikan sesuai prosedur yang telah tertulis

sebelumnya kepada seluruh siswa-siswi madrasah yang terdapat di kabupaten jember, yang diharapkan agar KIP dapat menunjang tingkat Pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya”. (Wawancara dengan Bpk. Nasri 24 Mei 2016).

Dari proses komunikasi yang telah dilakukan oleh pusat dan daerah tentunya sangat diharapkan untuk mampu sampai kepada sasaran kebijakan yaitu masyarakat. Seperti halnya menurut informan masyarakat ibu Indri menyebutkan “ Iya, saya tahu mengenai KIP itu sendiri mas, tapi sejauh ini saya masih belum seberapa tahu tentang cara mendapatkan KIP itu sendiri, dan saya berharap pemerintah seharusnya bisa memberikan sebuah informasi yang pas mengenai KIP mas. Hal ini juga dinyatakan oleh informan masyarakat Bpk. Handoko “Iya mas anak saya sekolah di madrasah dan sekolah negeri tapi mengenai KIP yang katanya bisa meringankan saya belum bisa mendapatkannya, karena informasi yang saya dapatkan kurang bagaimana cara untuk dapetnya sedangkan kata anak saya beberapa temannya sudah mendapatkannya”

Menurut Humas UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwates Bpk. Hamak

“Dari pihak UPT sudah memberitahukan kepada masyarakat tentunya kepada siswa – siswa sekolah yang terdapat di kecamatan kaliwates ini mengenai KIP baik mengenai cara hingga syarat-syaratnya baik melalui Lisan yang kami berikan maupun dari web yang telah tersedia”. (Wawancara dengan Bpk. Hamak, 23 Mei 2016)

Dari informasi yang telah didapat melalui beberapa informan dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh lembaga yang terkait kepada masyarakat masih kurang berjalan dengan baik, masih ada kendala – kendala yang menghambat untuk tercapainya sebuah kebijakan.

4.2.2 Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh sebuah implementor atau penerap kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan sebuah kebijakan dengan baik, seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, dan apabila implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dalam penelitian ini disposisi sangat berpengaruh dan harus berjalan dengan baik antara implementor dan pembuat kebijakan agar kebijakan tersebut berjalan sesuai keinginan. Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan sebuah kebijakan baru yang telah dibuat dan diputuskan oleh Inpres Nomor 7 Tahun 2014 dan mulai diundangkan oleh Permendikbud No.12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar dan dalam hal ini seluruh komponen

lembaga yang tergabung diwajibkan untuk menjalankan sesuai undang – undang yang berlaku.

Menurut informan Bpk Siswotanojo menyebutkan bahwa.

”KIP sebelumnya itu telah disahkan atau diundangkan oleh Kemendikbud, yang didalamnya terdapat juga lembaga-lembaga pendidikan yang terkait mas, jadi saya pikir dalam melakukan sebuah tindakan atau tugas kami disini dibawah kewenangan Kemendikbud dan tentunya harus sesuai apa yang telah diinginkan oleh kebijakan dari kemendikbud tersebut, makanya kami disini tidak main – main karena kebijakan ini haruslah tepat sasaran sesuai apa yang telah disebutkan dalam undang-undangnya” (Wawancara dengan Bpk Siswotanojo, 23 Mei 2016)

Selain itu menurut Bpk Nasri bidang Pendidikan Kementerian Urusan Agama Kabupaten Jember menyatakan.

“Dari pusat sudah kami terima dan kami jalankan di sekolah-sekolah dibawah naungan Kementriaan Agama, untuk disposisi sendiri menurut saya tidak ada kendala yang besar atau kendala-kendala yang dapat menghambatnya mas,sejauh ini baik-baik saja apa yang diharapkan pemerintah sudah kami jalankan tentunya dibawah kewenangan kami selaku Kementerian Agama”. (Wawancara dengan Bpk. Nasri, 24 Mei 2016)

Dari informasi yang telah diterima memang benar bahwa sebuah disposisi antara watak atau karakteristik setiap lembaga yang terdapat didalam sebuah kebijakan harus benar – benar sejalan dan seimbang antara implementor dan pembuat kebijakan. Hal inilah yang biasanya mengakibatkan suatu pengimplementasian kebijakan berjalan tidak sesuai harapan atau yang diinginkan. Sejauh ini disposisi yang terdapat dalam penelitian ini memang telah berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Namun dalam hal ini pemerintah atau pembuat kebijakan sebaiknya harus sering mengevaluasi atau turun tangan langsung terhadap kinerja lembaga-lembaga yang telah mengimplementasikan sebuah kebijakan yang dibuat, agar tidak adanya suatu masalah yang dapat menghambat kebijakan tersebut.

4.2.3 Sumber Daya

Walaupun sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan dan telah dikomunikasikan secara jelas serta konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif, tanpa sumberdaya, kebijakan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Informan Bapak Siswotanojo menyatakan.

“Untuk sumberdaya, nah ini mas yang kebanyakan menjadi kendala, disini saya menjelaskan bahwa untuk sumberdaya itu ada 2 menurut saya yakni sumberdaya manusianya dan sumber daya financial, untuk sumberdaya manusia kami yakin tidak ada kendala, ketika turun sebuah kebijakan atau tugas dari pusat otomatis langsung kami kerjakan atau implementasikan sesuai SOPnya, namun untuk sumber daya financialnya yang kebanyakan banyak dieluh-eluhkan, kurangnya perhatian pemerintah sehingga financial yang kami gunakan juga pas-pasan seperti untuk pemasangan brosur, baner, ATK dll masih kurang”. (Wawancara dengan Bpk. Siswotanojo 27 Mei 2016)

Dalam sebuah kebijakan sumber daya merupakan suatu hal yang sangat penting karena dalam penelitian ini sumber daya tidak hanya diartikan sebagai sumber daya alam saja, melainkan sumber daya manusia (SDM) dan sumberdaya financial. Yang dimana dalam sumberdaya tersebut sangatlah berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Bidang Pendidikan Kementerian Agama Bpk. Nasri menyatakan bahwa.

“Sumber daya jika didalam sebuah kebijakan yang bersifat tidak Nampak atau ulasan seperti kebijakan KIP ini bisa dikatakan tidak dilihat dari SDAny mas tapi yang menonjol yaitu sumber daya Financialnya atau pendaannya serta fasilitas yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Benar kita sudah mendapatkan atau menerima suatu kebijakan dari pusat, tapi dananya tidakada, apabisaberjalan? Tidakmungkinan?. Yatapi untuk sejauh ini yang saya lihat dilapangan atau saya lihat realnya sumber daya financial dari pusat itu masih ada dan cukuplah walaupun terkadang yang kita terima masih kurang. Serta fasilitas yang diberikan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan itu masih bisa dikatakan kurang memadai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga – lembaga dibawahnya yang langsung turun kelapangan”. (Wawancara dengan Bpk. Nasri, 30 Mei 2016)

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompetendankapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Selain itu fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staff yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saranadanprasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Menurut Ikhwan, Anggota Bidang Pendidikan Kementerian Agama mengatakan.

“Untuk fasilitas, atau sarana dan prasarana dilapangan itu masih kurang mas, dapat dilihat dalam wilayah per kecamatan ada madrasah didalamnya yang dibawah

naungan kementerian agama tapi untuk anggota lapangan yang mengurus dilapangan itu masih kekurangan fasilitas sarana dan prasana yang mendukung kinerja anggota-anggota dalam memberikan pelayanan yang cukup”. (Wawancara dengan Bpk. Ikhwan, 30 Mei 2016).

Oleh sebab itu dari hasil wawancara yang telah diambil dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan tidak akan berjalan jika tidak diimbangi dengan sumberdaya – sumberdaya yang mumpuni. Dan sumberdaya disini tidak berarti sumber daya alamnya saja namun sumber daya manusia dan sumber daya fisik dan financial haruslah berjalan simbang, agar tercapainya suatu tujuan dari kebijakan, tentunya kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Menurut informan bpk. Siswotanooyo mengatakan.

“Struktur birokrasi, menurut saya dalam hal struktur birokrasi dalam sebuah kebijakan itu harus jelas dan berjalan sesuai dengan keputusan atau kebijakan yang hendak ingin dicapai mas, tentunya dalam kebijakan ini Kartu Indonesia Pintar saya bisa mengatakan terdapat 2 komponen struktur birokrasi yakni dari pusat dan dari implementor, dari pusat telah menentukan siapa yang terlibat dalam sebuah keputusan, dan dari implementor sendiri itu juga terdapat struktur birokrasi yang mengikat guna mendukung berjalannya kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan”. (Wawancara dengan Bpk Siswotanooyo, 31 Mei 2016).

Bidang Pendidikan Kementerian Agama Bpk. Nasri menyatakan bahwa.

“Sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik dan sesuai yang dituju, atau diinginkan juga tergantung dengan struktur birokrasi yang baik didalamnya, untuk hal ini menurut saya dalam konteks KIP struktur birokrasi didalamnya sudah cukup baik seperti halnya pemerintah membuat kebijakan KIP saya rasa tepat dalam memilih siapa saja unsur birokrasi didalamnya, dan birokrasi yang menjalankan kebijakan tersebut juga tidak main-main dalam menyusun struktur birokrasi didalamnya, intinya tiaptiap tugas sudah ada yang menjalankannya”. (Wawancara dengan Bpk. Nasri, 30 Mei 2016).

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang utama dalam tercapainya sebuah kebijakan yang didalamnya berisi tentang pelaku atau aktor utama dalam pengimplementasian sebuah kebijakan dilapangan. Oleh sebab itu sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan apabila pembuat kebijakan maupun implementor salah dalam merumuskan atau menyusun sebuah struktur yang tepat.

Suatu kebijakan akan berjalan apabila ke empat komponen diatas terpenuhi hal ini dapat dinilai dari perencanaan sebuah kebijakan yang matang hingga pengimplementasiannya dilapangan. Menurut informan Bpk Siswotanojo mengatakan.

“KIP di kecamatan Kaliwates ini menurut saya berjalan sesuai apa yang direncanakan pemerintah, hal ini juga tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia, ya mulai dari perumusan permasalahannya, sasarannya,tujuan hingga penanggulangannya itu sudah dipikirkan oleh pemerintah jauh sebelumnya”. (Wawancara dengan Bpk. Siswotanojo, 16 Juni 2016).

Dalam hal pengimplementasian Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di lapangan dapat disimpulkan bahwa Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates tentunya telah di jalankan oleh implementor mulai dari proses komunikasi yang dilakukan antara implementor dengan pembuat kebijakan maupun implementor dengan fokus kebijakan yang telah dibuat yakni masyarakat penerima KIP. Dalam pengimplementasiannya implementor disini telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prosedur atau SOP yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan, hal ini dilakukan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai sasaran yang hendak dituju. Informan Bpk Siswotanojo mengatakan.

“untuk proses pengimplementasian dari KIP itu memang telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dari prosedur tersebut sebelumnya kami telah pahami bahwa, tujuan pemerintah membuat kebijakan ini adalah untuk meningkatkan mutu dan standard pendidikan di Indonesia, tentunya juga pemerintah ingin meringankan beban masyarakat Indonesia, untuk itu dalam pengimplementasiannya kami selaku Implementor tidak hanya sekedar melakukan atau melaksanakan saja, namun kami telah berpegang teguh dengan standard operasional atau SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakannya”.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengimplementasian Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, dan untuk implementor atau pihak yang menjalankannya memang sudah melakukan sesuai dengan apa yang harus dilakukan dilapangan, dan tentunya implementor melakukan sebuah pengimplementasian yang didasari oleh standar operasional atau SOP yang telah dibuat oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang diharapkan

4.3 Efektivitas Peran Pelaksana Dilapangan

Dalam sebuah kebijakan, dapat dikatakan efektif apabila implementor telah melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah itu sendiri, guna tercapainya suatu tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu dalam pengimplementasian KIP ini efektivitas peran pelaksana harus berjalan sesuai dengan SOP yang ditentukan dan dibuat oleh pemerintah. Untuk itu dalam hal ini efektivitas peran pelaksana dilapangan bisa dilihat dari.

4.3.1 Proses penyuluhan

Dalam hal ini sebuah proses dibutuhkan untuk mewujudkan suatu implementasi dari sebuah kebijakan Kartu Indonesia Pintar, salah satunya proses penyuluhan, proses penyuluhan merupakan proses dimana sebuah kebijakan itu diimplementasikan atau dijalankan oleh implementor terhadap sasaran kebijakan, dalam Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini sebuah proses penyuluhan haruslah memang benar-benar dilakukan oleh implementor itu sendiri. Menurut Bpk Siswotanojo Kepala Bidang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates mengatakan.

“Untuk proses penyuluhan kepada masyarakat mengenai Kartu Indonesia Pintar ini memang sudah kami lakukan, kebijakan ini memfokuskan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan semua telah kami lakukan dengan upaya mensosialisasikan di sekolah – sekolah dan sebagian dari tim kami memang turun langsung kepada masyarakat untuk mensosialisasikannya”. (Wawancara dengan Bpk. Siswotanojo 22 Juni 2016)

Sementara menurut Bpk. Hamak Humas UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates menyebutkan “Proses penyuluhan atau sosialisasi telah kita lakukan di sekolah-sekolah yang terapat di wilayah kecamatan Kaliwates ini,beberapa juga pernah dilakukan di lingkungan masyarakat kecamatan kaliwates” (wawancara dengan Bpk. Hamak, 22 Juni 2016) dan menurut Ibu Sadikin masyarakat Kecamatan Kaliwates mengatakan “ iya memang benar dari pemerintah sendiri telah melakukan sosialisasi mengenai KIP itu disekolah-sekolah anak saya, dan saya tau itu dari anak saya sendiri yang kemudian saya cepatcepat buat mengurusinya”. (Wawancara dengan ibu Sadikin, 28 Juni 2016).

Semua proses dalam kebijakan memang seharusnya dilakukan oleh implementor, hal ini dilakukan agar masyarakat atau sasaran dari sebuah kebijakan mengetahui tentang mengapa, bagaimana dan untuk apa kebijakan itu dibuat.

4.3.2 Proses Penentuan Siapa yang Dapat Menerima KIP

Penerima atau sasaran suatu kebijakan dalam kebijakan ini sebelumnya telah ditentukan dalam Permendikbud No.12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar, hal ini juga dijelaskan oleh Bpk. Siswotanojo.

“Masyarakat semuanya itu berhak mendapatkan KIP, namun dalam kebijakan ini kami masih berpegang terhadap UU yang mengatur tentang kebijakan ini, yang berfokus terhadap masyarakat yg tidak mampu”. (Wawancara dengan Bpk. Siswotanojo, 23 Juni 2016)

Dalam penentuan setiap kebijakan memang seharusnya pembuat kebijakan tersebut melakukan pemantauan atau observasi terlebih dahulu, agar suatu kebijakan tepat sasaran terhadap suatu permasalahan yang sedang dialami dalam hal ini tentunya masyarakat itu sendiri. Menurut Bapak Nasri Kepala Bidang Pendidikan Kementerian Agama menyebutkan.

“Suatu kebijakan itu tentunya harus melihat apa yang sedang terjadi di masyarakat, seperti halnya KIP ini sendiri mas, pemerintah tentu telah melakukan suatu observasi atau pemantauan terlebih dahulu, tidak asal membuat kebijakan, ya untuk KIP ini sendiri, pemerintah lebih memfokuskan masyarakat kurang mampu tentunya juga guna menunjang tingkat pendidikan di Indonesia”. (Wawancara 16 Juni 2015).

Sedangkan menurut bapak Sriyadi, masyarakat penerima KIP menjelaskan “Saya telah menerima KIP baru ini mas, memang benar dalam mendapatkannya itu pemerintah tidak sembarangan memberi KIP itu, karena sebelum mendapatkannya itu, kalau dinilai dari keluarga yang menengah keataslah itu tidak akan diberi”. (Wawancara tgl 25 Juni 2016)

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Nurul masyarakat yang tidak menerima KIP “ Saya tidak menerima KIP, sebab dari info yang saya ketahui memang KIP itu dikhususkan untuk orang yang memang benar-benar tidak mampu mas, saya pernah mencoba untuk mengajukannya namun sampai sekarang belum mendapatkannya”. (Wawancara dengan Ibu Nurul, 25 Juni 2016)

Suatu kebijakan dinilai efektif apabila kebijakan tersebut memang benar-benar tepat kepada sasaran, maka dari itu kebijakan KIP ini bisa dinilai sudah tepat sasaran terhadap masyarakat yang memang benar – benar membutuhkannya. Untuk itu pemerintah harus lebih meningkatkan produktifitasnya dalam membuat suatu kebijakan tentunya kebijakan yang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

4.3.3 Proses Pemberian Bantuan Dana Kartu Indonesia Pintar

Dalam hal membuat kebijakan Kartu Indonesia Pintar tentunya pemerintah harus benar – benar matang terhadap segala isi kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan, hal ini dilakukan agar sasaran atau masyarakat tidak bingung dalam menerima sebuah kebijakan tersebut. Menurut Bpk Siswotanojo Kepala Bagian UPT dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates menuturkan bahwa.

“Dalam proses pemberian bantuan dana itu sudah jelas mulai dari puncak akan turun kebawah ya mulai dari observasi pemerintah, untuk apa sih kebijakan itu dibuat? Untuk sapa? Apa gunanya? Itu sudah jauh jauh hari pemerintah telah menggodoknya secara matang, yang kemudian dari observasi tersebut dibuatlah undang-undangnya dan disahkan, kemudian UU tersebut akan turun kepada Implementor atau pihak yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya ya seperti dinas pendidikan ini kemudian, dari Dinas pendidikan mulai melaksanakannya seperti apa isi kebijakan tersebut mulai dari sapa targetnya hingga bagaimana prosesnya akan diberitahukan ke masyarakat, sedangkan untuk dana sendiri itu berupa uang yang akan diberikan kepada penerima KIP yang kemudian dicairkan melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah ” (wawancara tgl 23 Juni 2016).

4.3.4 Proses monitoring pemberian dan evaluasi bantuan

Proses monitoring atau pengawasan merupakan sebuah proses dimana implementor maupun pemerintah melakukan sebuah pengawasan terhadap kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan. Dalam hal ini implementorlah yang harus bekerja extra guna tercapainya suatu tujuan kebijakan tersebut dibuat. Menurut Bpk Hamak selaku humas UPT dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates menjelaskan “dari proses pengawasan kami memang tidak main-main mas, sebab setiap kebijakan yang telah dijalankan harus diawasi bagaimana jalannya dilapangan, sesuai apa tidak? Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan”. (Wawancara 23 Juni 2016). Sementara itu menurut Bapak Siswotanojo menyebutkan bahwa.

“Proses ini tidak main-main mas, karena demi tercapainya sebuah tujuan kebijakan KIP ini, proses pengawasan telah dilakukan oleh kami terhadap berjalannya kebijakan tersebut, itu sudah kami bentuk tim tersendiri untuk melakukannya, proses ini kami lakukan mulai dari implementasinya hingga akhir tetap kami lakukan pengawasan, ya tentunya supaya tercapainya tujuan kebijakan KIP ini mas” (Wawancara 23 Juni 2016).

Kebijakan KIP merupakan sebuah kebijakan baru yang telah dibuat pemerintah guna meringankan beban masyarakat akan besarnya biaya pendidikan dan guna memajukan pendidikan di Indonesia. Wawancara dengan ibu sri rahayu, masyarakat kecamatan kaliwates menyebutkan “iya mas, saya tahu tentang KIP itu menurut saya KIP sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, tapi kadang kadang ada juga yang udah dapet KIP tapi keadaan keadaan ekonominya menengah keatas lah “. (Wawancara 24 Juni 2016)

Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan implementor dapat menjadi faktor dan kendala utama dalam pengimplementasian kebijakan KIP. Menurut Bpk Siswotanooyo mengatakan bahwa.

“Semua kinerja atau pelayanan yang telah diberikan masyarakat telah sesuai dengan SOP yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, mulai dari cara mendapatkan KIP itu sendiri hingga bagaimana masyarakat menggunakan dan mencairkan KIP itu mas, jadi saya rasa kami telah bekerja keras dan sungguh sungguh dalam menjalankan kebijakan tersebut”. (Wawancara 23 Juni 2016)

Dalam penelitian yang saya lakukan antusias masyarakat dalam menanggapi kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini bisa dikatakan cukup besar, namun dalam hal pelayanan agar mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini, masih banyak masyarakat yang mengeluh – eluhkaanya. Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kaliwates Bpk. Asmari “KIP itu bagus mas, salah satu upaya dari pemerintah, tapi ya jangan terlalu ruwetlah untuk dapetnya, ya kita masyarakat susah masa’ mau dibikin susah dan ruwet lagi buat dapetnya” (Wawancara 27 Juni 2016). Dan menurut Ibu Kepala SMP 1 Jember mengatakan bahwa.

“KIP merupakan kebijakan yang sangat bagus menurut saya dan telah berjalan disekolah ini, cara mendapatkan KIP sendiri itu tidaklah sulit mas, hal ini bisa dilihat dari jumlah seluruh siswa yang mendapatkan KIP di Sekolah ini yang cukup banyak, untuk itu kepada seluruh masyarakat atau murid yang telah mendapatkannya saya harap untuk tidak menyalahgunakan dana tersebut dan lebih giat belajar tentunya”. (Wawancara 30 Juni 2016)

Dari beberapa proses yang dilakukan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas peran pelaksana dilapangan memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah namun masih terdapat kendala-kendala yang masih terjadi sehingga dapat mengurangi tingkat efektivitas peran pelaksana dilapangan. Untuk itu diharapkan pemerintah atau pembuat kebijakan untuk meningkatkan evaluasi kinerja terhadap implementor atau pelaksana dilapangan guna untuk dapat meningkatkan keefektifan peran pelaksana dilapangan itu sendiri. Mulai dari proses penyuluhan hingga proses evaluasi dan monitoring yang telah dilakukan atau dijalankan oleh implementor.

